

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

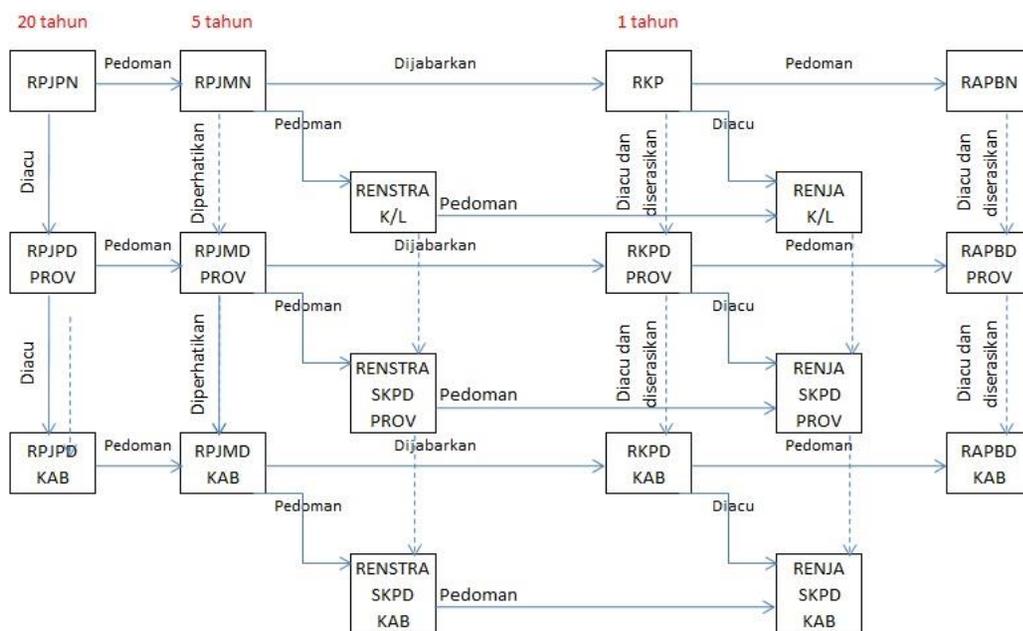
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah

disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal BKPSDM yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan BKPSDM;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana BKPSDM;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra BKPSDM;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan BKPSDM;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan BKPSDM dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan BKPSDM.

b. Analisis gambaran pelayanan BKPSDM;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan BKPSDM adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan BKPSDM;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra BKPSDM untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2022 berdasarkan APBD

yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2022;

- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada BKPSDM.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun lalu berdasarkan Renstra BKPSDM

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BKPSDM. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra BKPSDM dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BKPSDM tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra BKPSDM;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra BKPSDM dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra BKPSDM sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan BKPSDM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BKPSDM;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKPSDM;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDM;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai

dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BKPSDM.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh BKPSDM. Namun dalam proses ini BKPSDM mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh BKPSDM terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen Renja BKPSDM;

Penyusunan dokumen rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi

birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Renja BKPSDM

Penyempurnaan Renja BKPSDM perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk Rencana Kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja BKPSDM dengan saran dan masukan dari tim desk Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen Renja BKPSDM dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen Renja BKPSDM yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi, kodefikasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi BKPSDM Kabupaten

Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGUNG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2021 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2021 terhadap capaian renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2022.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung
s.d Tahun 2021

| No | Bidang / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satu an | Target 2021 | | | Realisasi per Triwulan Th. 2021 | | | | | | | | Realisasi 2021 | | Capaian 2021 | | Ket. |
|----------|--|---|------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------|------|
| | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | |
| | | | | K | Rp (RENJA) | Rp (DPA) | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | | 100 | 155.000.000 | 73.238.200 | 100 | 15.561.850 | 100 | 25.191.350 | 100 | 10.636.950 | 100 | 20.050.750 | 100 | 71.440.900 | 100 | | |
| | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor | | 12 | 7.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3 | 175.000,00 | 3 | 959.000,00 | 3 | 1.659.000 | 3 | 2.151.000,00 | 12 | 4.944.000 | 100 | 98,88 | |
| | 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersediannya ATK | | 12 | 19.000.000,00 | 10.069.200,00 | 3 | 2.672.500,00 | 3 | 2.712.500,00 | 3 | 2.547.700 | 3 | 2.084.000 | 12 | 10.016.700 | 100 | 99,48 | |
| | 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | | 12 | 19.000.000,00 | 9.068.000 | 3 | 3.100.500 | 3 | 3.135.500 | 3 | 2.832.000 | 3 | 548.400 | 12 | 9.616.400 | 100 | 106 | |
| | 4 Fasilitas Kunjungan Tamu | Tersedianya jamuan makan dan minuman rapat / tamu | | 12 | 30.000.000,00 | 18.476.500 | 3 | 3.344.250 | 3 | 2.277.250 | 3 | 3.458.250 | 3 | 7.422.250 | 12 | 16.502.000 | 100 | 89,31 | |
| | 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | 12 | 80.000.000,00 | 30.624.500,00 | 3 | 6.269.600,00 | 3 | 16.107.100,00 | 3 | 140.000 | 3 | 7.845.100 | 12 | 30.361.800 | 100 | 99,14 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah | | | 1 | 35.000.000,00 | 5.223.800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 5.076.000,00 | 1 | 5.076.000,00 | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|----|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----|-----------------------|-------|--------------|
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 2 | 35.000.000,00 | 5.223.800,00 | 0 | 0 | | 0 | | - | 1 | 5.076.000 | 1 | 5.076.000 | 50,00 | 97 |
| b | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 292.888.888,00 | 279.035.100,00 | | 62.574.539,00 | | 62.128.325,00 | | 66.617.920,00 | | 67.997.235,00 | | 259.318.019,00 | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat (jasa pelayanan kantor dan SPPD dalam daerah) | 12 | 12.000.000,00 | 5.550.000,00 | 3 | 2.225.500,00 | 3 | 1.188.500,00 | 3 | 1.372.500 | 3 | 570.400 | 12 | 5.356.900 | 100 | 96,52 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 | 48.888.888,00 | 48.000.000,00 | 3 | 8.946.669,00 | 3 | 9.076.565,00 | 3 | 9.683.310 | 3 | 9.317.415 | 12 | 37.023.959 | 100 | 77,13 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 12 | 232.000.000,00 | 225.485.100 | 3 | 51.402.370,00 | 3 | 51.863.260 | 3 | 55.562.110 | 3 | 58.109.420 | 12 | 216.937.160 | 100 | 96,21 |
| | | Tersedianya jasa kebersihan kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 420.000.000 | 149.500.000 | | 11.196.297 | | 31.355.685 | | 45.352.684 | | 38.033.734 | | 125.938.400 | | 84,24 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 12 | 70.000.000 | 90.000.000 | 3 | 10.296.297 | 3 | 18.444.688 | 3 | 25.201.181 | 3 | 23.369.234 | 12 | 77.311.400 | 100 | 85,90 |
| | Pemeliharaan mebel | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 12 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 775.000 | 3 | 2.200.000 | 12 | 2.975.000 | 100 | 99,17 |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | terlaksananya pemeliharaan rutin//berkaa peralatan rutin / beraka gedung kantor | 12 | 300.000.000 | 29.500.000 | 3 | 900.000 | 3 | 11.055.500 | 3 | 5.745.000 | 3 | 5.205.000 | 12 | 22.905.500 | 100 | 77,65 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|-------------|---------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|----------------------|-------|-----|
| | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | | 12 | 40.000.000 | 20.000.000 | 3 | 0 | 3 | 1.855.497 | 3 | 13.631.503 | 3 | 3.772.000 | 12 | 19.259.000 | 100 | 96,30 | |
| | 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor | | 12 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.487.500 | 12 | 3.487.500 | 100 | 50 | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 96,67 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat | Sangat tinggi | | |
| 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 493.000.000 | 1.848.525.000 | | 13.216.194 | | 18.294.040 | | 36.762.900 | | 1.445.755.799 | | 1.514.028.933 | | | | |
| | | | Persentase penyusunan formasi pegawai' | % | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | persentase penyelesaian pensiun PNS tepat waktu | % | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | persentase penyelesaian kenaikan pangkat tepat waktu | % | 100 | | | 79,77 | | 99,31 | | 98,25 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | |
| | | | persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas | % | 80 | | | 90,19 | | 91 | | 88,89 | | 90,33 | | 90,33 | | 100,00 | | |
| | | | persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas | % | 47 | | | 47,04 | | 47,08 | | 47,56 | | 46,96 | | 46,96 | | 99,91 | | |
| | | | persentase pelanggaran disiplin ASN | % | 0,3 | | | 0,18 | | 0,23 | | 0 | | 0,23 | | 0,25 | | 0,25 | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|
| | | persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN | % | 90 | | | 0,00 | | 0 | | 52 | | 86,67 | | 86,67 | | 96,30 | |
| | | persentase pelaksanaan updating data kepegawaian | % | 90 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | |
| | | Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional | % | 100 | | | 100,00 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | |
| | Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN | Tersedianya dataformasi pegawai | doku men | 1 | 408.000.000 | 1.818.806.000 | 1 | 7.196.094 | 0 | 8.113.540 | 0 | 36.000.000 | 0,00 | 1.438.276.499 | 1 | 1.489.586.133 | 100 | 81,90 |
| | | Terlaksananya dan terfasilitasinya seleksi CPNS | kegia tan | 1 | | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | 1 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Diterbitkannya dan diserahkan KARIS / KARSU, KARPEG dan SK pensiun | karu/ sk | 400 | 31.000.000 | 11.609.000,00 | 160 | 5.335.500 | 96 | 3.290.500 | 317 | 283.800 | 81 | 1.976.000 | 654 | 10.885.800 | 100 | 93,77 |
| | 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terkelolanya Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian dan terlaksananya update data kepegawaian PNS | OPD / recor d | 5000 | 54.000.000 | 18.110.000 | 1.540 | 684.600 | 1.413 | 6.890.000 | 1.949 | 479.100 | 1.354 | 5.503.300 | 6256 | 13.557.000 | 100 | 74,86 |
| | b Mutasi dan Promosi ASN | | | | 526.000.000 | 371.148.200 | | 42.985.546 | | 54.660.000 | | 130.644.000 | | 113.353.950 | | 341.643.496 | | |
| | 1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Diserahkannya SK pEngangkatan CPNS menjadi PNS | keg/ org | 38 | 56.000.000 | 23.980.200 | 0 | 13.797.500 | | 5.629.500 | 0 | 1.287.000 | - | 2.885.200 | 1 | 23.599.200 | 3 | 98,41 |
| | | Terbitnya SK Kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat (| SK | 1000 | | | 347 | | 76 | | 476 | | 16 | | 915 | | 92 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|---|----------------|-----|--------------------|-------------------|-----|-------------------|----|-------------------|----|------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------|
| | 2 | Pengelolaan Promosi ASN | Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS | Dokumen | 12 | 470.000.000 | 347.168.000,00 | 4 | 29.188.046 | 2 | 49.030.500 | 3 | 129.357.000 | 3 | 110.468.750 | 12 | 318.044.296 | 100 | 91,61 |
| | | | Terlaksananya Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama | Kgt | 1 | | | 0 | | 0 | | 1 | | - | | 1 | | | |
| | | | Terlaksananya prosesi pengambilan sumpah, pelantikan, dan penyerahan SK | kgt | 6 | | | 5 | | 1 | | 0 | | - | | 6 | | | |
| | c | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | 55.000.000 | 54.318.500 | | 29.008.500 | | 1.738.800 | | 308.000 | | 20.217.955 | | 51.273.255 | | |
| | 1 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Diberikannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | orang | 3 | 40.000.000 | 46.500.000 | 3 | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.000.000 | 3 | 45.000.000 | 100 | 96,77 |
| | 2 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Terbinanya tim PAK dan pejabat fungsional | SK | 300 | 15.000.000 | 7.818.500,00 | 252 | 2.008.500 | 28 | 1.738.800 | 86 | 308.000 | 16 | 2.217.955 | 382 | 6.273.255 | 100 | 80,24 |
| | d | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 217.000.000 | 51.457.500 | | 6.806.000 | | 19.000.700 | | 8.912.800 | | 14.777.500 | | 49.497.000 | | |
| | 1 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terlaksananya fasilitasi penyusunan SKP/P2KP bagi PNS | unit kerja/OPD | 10 | 10.000.000 | 14.578.000 | 0 | 0 | 0 | 9.036.700 | 0 | 756.000 | 20 | 4.734.200 | 20 | 14.526.900 | 100 | 99,65 |
| | | | Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan | Orang | 3 | | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 2 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terkirimnya dokumen usulan pemberian penghargaan satya lencana karya satya dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi (Penghargaan Satya lencana karya satya) | dokumen/orang | 50 | 75.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.904.000 | 0 | 700.000 | 123 | 3.626.000 | 123 | 8.230.000 | 100 | 82,30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------|-------|------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|-------|----------------------|-------|-------|
| | | Tersusunnya Perbup tentang TPP Pegawai ASN Pemkab. Temanggung | Perbup | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | | | | |
| 3 | Pembinaan Disiplin ASN | Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian bagi Kepala OPD dan/pengelola kepegawaian | orang | 140 | 72.000.000 | 16.371.000 | 0 | 6.806.000 | 150 | 560.000 | 0 | 5.354.600 | - | 3.536.000 | 150 | 16.256.600 | 100 | 99,30 |
| | | Terlaksananya monev pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawain | unit kerja/OPD | 25 | | | 0 | 0 | 0 | | | 36 | | 36 | | | | |
| | | Tercetaknya ID Card bagi ASN | buah | 1500 | | | 226 | 130 | 100 | | | 1.044 | | 1500 | | | | |
| 4 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Diberikannya surat/SK hukuman disiplin pada PNS yang in disiplin sebagai bentuk pembinaan | orang | 15 | 60.000.000 | 10.508.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 13 | 2.102.200 | - | 2.881.300 | 13 | 10.483.500 | 86,67 | 99,76 |
| | | Terselesaikannya SK izin perceraian | SK/orang | 15 | | | 0 | 4 | 4 | | | 8 | | 16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 | | 90,07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat | | Sangat tinggi | | |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan | % | 29,69 | | | 24,80 | 0 | 20,70 | | 26,14 | 25 | 25,08 | 0 | 84,47 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-----|----------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----|-------------------|-------|----------------------|-----|-------|
| | | Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional | % | 9 | | | 10,64 | 0 | 11,35 | | 12,95 | | 15 | | 14,57 | | 100 | |
| | a Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | 200.000.000 | 95.154.500 | | 980.500 | | 13.694.250 | | 16.384.500 | | 61.763.900 | | 92.823.150 | | |
| | 1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya bimtek secara mandiri (Bimtek Pengelolaan BOS, Bimtek Komputer, Bimtek administrasi perkantoran berbasis IT) | kgt | 4 | 200.000.000 | 95.154.500 | 1 | 980.500 | 0 | 13.694.250 | 2 | 16.384.500 | 1 | 61.763.900 | 4 | 31.059.250 | 100 | 32,64 |
| | b Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | 1.660.000.000 | 1.408.591.385 | 1 | 98.560.000 | 0 | 687.888.363 | 2 | 536.711.200 | | 73.870.400 | | 1.397.029.963 | | |
| | 1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Terkirimnya diklatsar/prajabatan bagi CPNSD | orang | 37 | 1.660.000.000 | 1.408.591.385 | 0 | 98.560.000 | 0 | 687.888.363 | 38 | 536.711.200 | - | 73.870.310 | 38 | 1.397.029.873 | 100 | 99,18 |
| | | Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat pim II, III, dan IV | orang | 30 | | | 16 | 0 | 8 | | 6 | | - | | 30 | | | |
| | | Terkirimnya peserta kursus, pelatihan sosialisasi bimtek, ujian dinas, diklat profesi serta sertifikasi | orang | 100 | | | 118 | 0 | 8 | | 47 | | 7 | | 180 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|----|---------------|---------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|---------------|---|---------------|--|
| | | Terfasilitasnya uji kompetensi bagi pejabat fungsional | orang | 50 | | 4 | 0 | 21 | | 0 | | 25 | | 50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Predikat | Sangat tinggi | |
| | | | | | 4.053.888.888 | 4.336.192.185 | | 280.889.426 | | 913.951.513 | | 852.330.954 | | 1.860.897.223 | | 3.908.069.116 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH | 95,58 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT | Sangat tinggi | |
| | | | | | | | | | | | | | | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH | 98,24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT | AKAN TERCAPAI | |

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan di Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan/sub kegiatan sbb:
 - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1) Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - b. Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Pengelolaan Promosi ASN
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - d. Pengembangan Kompetensi Teknis
 - 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - e. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan/sub Kegiatan sbb:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (125,12%)
 - b. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (127,3%)
 - c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (200%)
 - 2) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (246%)
 - 3) Pembinaan Disiplin ASN (107,14%)

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, kegiatan/sub kegiatan tersebut adalah:

- a. Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (91,5%)
- b. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (86,67%)

Penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut diatas disebabkan karena:

- a. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, target tahun 2021 direncanakan sebanyak 1.000 SK hanya terealisasi sebanyak 915 SK Kenaikan pangkat, hal ini terjadi karena usulan kenaikan pangkat khususnya untuk Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional tidak semua usulan disetujui oleh BKN, karena belum dilakukan kenaikan jenjang untuk jabatan fungsionalnya (bagi Jabfung yang kenaikan pangkatnya bersamaan dengan kenaikan jabatan).
- b. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ditargetkan 100% hanya terealisasi 86,67% hal ini dikarenakan kasus terjadi/dilaporkan pada akhir tahun 2021, sehingga pada akhir tahun tersebut masih dalam proses penanganan kasus, sehingga belum dapat diterbitkan SK pelanggaran disiplinnya.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BKPSDM
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDIS I 2018 | TARGET KINERJA | | | | | REALISASI KINERJA | | | CAPAI AN 2021 (%) | STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD | | | CAPAI AN s.d 2021 (%) | STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD | | |
|--------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--------------|-------------------|------------------------------|-----|-----------|-----------------------|------------------------------|-----|-----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | | TT | A T | U K | | TT | A T | U K |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I. INDIKATOR SASARAN PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN | angka indek | 46 | 49 | 50,03 | 50,05 | 50,07 | 50,09 | 51,7 | 50,03 | 51,24 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | |
| | Indeks Merit System | angka indek | n.a | n.a | n.a | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0 | 0 | 0,259 | 63,17 | | | UK | 42,46 | | | UK |
| INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penyusunan formasi pegawai | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | TT | | | 100 | TT | | |
| | Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | TT | | | 100 | TT | | |
| | Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu | % | 99,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | TT | | | 100,00 | TT | | |
| | Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional | % | n.a | n.a | 95 | 100 | 100 | 100 | n.a | n.a | 100 | 100,00 | TT | | | 100 | TT | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|-------|------|-------|-------|------|-----|-------|-------|--------------|---|----|----|-------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 3 | Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas | % | 95,17 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77,48 | 76,38 | 90,33 | 100 | TT | | 100 | TT | | | | | | | |
| | Persentase perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas | % | 44,79 | 45,5 | 46 | 47 | 47 | 48 | 45,81 | 46,79 | 46,96 | 99,93 | | AT | 97,84 | | AT | | | | | | |
| | Persentase pelanggaran disiplin ASN | % | 0,17 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 100 | TT | | 100 | TT | | | | | | | |
| | Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN | % | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 86,67 | 96,30 | | AT | 96,30 | | AT | | | | | | |
| | Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian | % | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | TT | | 100 | TT | | | | | | | |
| 3 | Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan | % | 35,63 | 37,6 | 27,08 | 29,69 | 32 | 35 | 37,91 | 27,08 | 25,08 | 84,47 | | AT | 71,66 | | AT | | | | | | |
| | Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional | % | 10 | 3 | 4,5 | 9 | 13,5 | 18 | 4,87 | 7,36 | 14,57 | 100 | TT | | 80,94 | | AT | | | | | | |
| Indikator Sasaran PD : 2 | | | | | | | | | | | | Rata rata capaian kinerja sasaran | | | | 81,59 | 1 | 0 | 1 | 71,23 | 1 | 0 | 1 |
| Indikator Program : 11 | | | | | | | | | | | | Rata rata capaian kinerja program | | | | 98,24 | 8 | 3 | 0 | 95,16 | 7 | 4 | 0 |
| Jumlah Indikator : 13 | | | | | | | | | | | | Rata rata capaian perangkat daerah | | | | 89,92 | 9 | 3 | 1 | 83,19 | 8 | 4 | 1 |

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran PD

a. Indeks Profesionalitas ASN dengan status telah tercapai.

Penghitungan pencapaian IP ASN pada tahun 2021 berdasarkan hasil hitungan secara manual dengan data yang ada di BKPSDM, belum mendapatkan verifikasi dari BKN, verifikasi dari BKN untuk mendapatkan nilai ASN Kabupaten Temanggung baru diketahui pada awal triwulan II tahun 2022, karena di akhir tahun 2021 data Kinerja (nilai P2KP) belum terunggah di aplikasi SAPK/IP ASN.

Meskipun capaian IP ASN tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 dan telah mencapai dari target yang direncanakan, akan tetapi masih tergolong dalam kategori sangat rendah.

Faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut/rekomendasi indikator ini adalah :

- 1) Faktor Pendorong: Update data kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di PD dan atau update data yang dilakukan secara mandiri oleh ASN lewat aplikasi MySAPK dan keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri.
- 2) Faktor penghambat: belum terkoneksi Data Kepegawaian dengan perhitungan Indeks
- 3) Rekomendasi/tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/mengeluarkan nilai indeks.

b. Indeks Merit System dengan status perlu upaya keras

Pengukuran pengembangan karir dengan system merit baru dilakukan pada Tahun 2021, capaian kinerja indikator ini tahun 2021 merupakan hasil verifikasi dari KASN terhadap bukti dukung aspek-aspek penilaian system merit di tahun 2020.

Pada tahun 2020 penilaian merit system dilakukan secara mandiri dengan cara mengunggah data dukung aspek aspek system merit lewat aplikasi *sipinter*, dan baru mendapatkan

penilaian/verifikasi dari KASN di bulan November 2021, adapun tambahan kinerja setiap aspek penilaian merit system yang telah dilakukan di tahun 2021 belum dapat ditambahkan untuk penambahan skore merit system tahun 2021 karena dokumen pendukung/pelaksanaan kegiatannya baru dilaksanakan pada akhir triwulan IV tahun 2021.

Faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi/tindaklanjut indikator kinerja ini adalah:

- 1) Faktor Pendorong : Komitmen Pemerintah daerah untuk menggunakan sistem merit dalam pengelolaan manajemen PNS;
- 2) Faktor penghambat : Belum adanya kebijakan internal yang mengatur beberapa aspek dalam sistem merit. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pelaksana manajemen PNS.
- 3) Tindak lanjut/rekomendasi: Perlu adanya kerja sama dan komitmen, baik internal BKPSDM maupun dengan instansi yang terkait dengan penerapan Sistem Merit, yaitu Bagian Organisasi Setda, Bagian Hukum Setda dan Bappeda.

2. Capaian indikator Program dengan status telah tercapai ada 8 terdiri dari:

a. Persentase Penyusunan Formasi Pegawai.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Menyusun Formasi Kepegawaian merupakan kewajiban Perangkat Daeran dan juga di tahun 2021 Permintaan bahan usulan kebutuhan CASN dari BKN yg harus dikirimkan sebelum tanggal 31 maret 2021.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: a) Beberapa jabatan belum disesuaikan dengan Peta jabatan yang ada, b) beberapa jenjang jabatan fungsional belum terakomodir dalam peta jabatan yang ada
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan koordinasi internal di BKPSDM dan Koordinasi

yang intensif dengan Bagian Ortala Setda.

- b. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah semakin meningkatnya pelayanan administrasi urusan pensiun di BKN dan Kerjasama/ kinerja yang baik antar pengelola kepegawaian tingkat kabupaten maupun pengelola kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kelengkapan dan kevalidan berkas usul pensiun.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi yang intensif dengan PD dan BKN.
- c. Persentase Penyelesaian Usulan kenaikan pangkat PNS tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang intensif dan baik dengan BKN selaku pemberi persetujuan teknis dan verifikator Administrasi usulan kenaikan pangkat PNS dan Kerjasama dan kinerja Perangkat Daerah Pengusul berkas kenaikan pangkat PNS yang tepat waktu.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - a. Usulan berkas kenaikan pangkat dari Perangkat Daerah terdapat kesalahan administrasi dalam pembuatan dokumennya, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan perbaikan.
 - b. Untuk JF yang kenaikan jabatannya bersamaan dengan Kenaikan pangkat, maka proses koreksi di BKN menunggu selesai kenaikan jabatannya.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pemberi persetujuan teknis dan verifikator dan pemberian pendampingan untuk JF (administrasi Kenaikan Pangkat)
- d. Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah: Komitmen Kinerja Tim penilai dalam pelaksanaan penilaian.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: Kurangnya pemahaman atas peraturan perundangan yang berlaku terkait jabatan fungsional dari para Pejabat Fungsional
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah: Dilakukan Pembinaan dan Koordinasi dengan instansi pengusul.
- e. Persentase Pelaksanaan updating data kepegawaian
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kinerja Pengelola Kepegawaian PD yang konsisten mengirimkan update data kepegawaiannya ke BKPSDM dan adanya SIMPEG Online memudahkan pengiriman/update data kepegawaian secara mandiri
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah bukti fisik terhadap update data kepegawaian dari PD tidak tersampaikan ke BKPSDM
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Konfirmasi ke PD atas kebenaran perubahan/ update data kepegawaian yang dilakukan.
- f. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jababat Pengawas.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong, dan adanya penyederhanaan birokrasi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: Keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menambah kuota peserta diklatpim, dan dilakukan assessment/talenta terhadap PNS yang memenuhi syarat untuk diproyeksikan menduduki jabatan struktural.
- g. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian terhadap para pejabat struktural kadang tidak tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Dilakukan sosialisasi kepada unit PD terkecil secara non formal.
- h. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional
- 1) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah: Dengan adanya Covid -19 pada T.A 2020 maka penyelenggaraan maupun pengiriman peserta Bimtek/diklat teknis fungsional mengalami penundaan dan untuk Bimtek TF, berkurangnya anggaran untuk Bimtek TF sehingga mengurangi target peserta bimtek, sehingga berdampak pada capaian indikator di tahun 2021
 - 2) Faktor pendorong indikator tersebut adalah: Tawaran keikutsertaan Diklat Teknis/Fungsional tidak hanya dari Badan Diklat Provinsi Jateng (BPSDMD) akan tetapi juga dari instansi vertikal penyelenggara diklat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan komunikasi ke BPSDMD untuk penyelenggaraan Bimtek TF secara virtual.
3. Capaian indikator Program dengan status akan tercapai ada 3 terdiri dari:
- a. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Atasan langsung segera menindaklanjuti atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terjadinya kasus pada akhir tahun sehingga pada akhir tahun tersebut masih dilakukan tahapan penyelesaian kasus.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memaksimalkan dan mengupayakan penyelesaian kasus

di bulan/triwulan/tahun berkenaan.

b. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perencanaan Pengukuran target Kinerja yang realistis dengan kemampuan keuangan yang ada dan komitmen peserta diklat untuk lulus diklat
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan kuota dari penyelenggara Diklat managerial (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan diklat, dan adanya refocusing anggaran
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov.DIY.

c. Persentase Perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan jabatan Pengawas

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah makin terbuka dan meningkatnya kompetensi perempuan untuk menjabat pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menambah kuota peserta diklatpim, khususnya perempuan

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok Pembangunan pada BKPSDM Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok capaian Indikator sasaran perangkat Daerah dan Data Pokok Bidang pendukung capaian indikator kinerja program dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok capaian indikator sasaran Perangkat Daerah

a. Indeks Profesionalitas ASN

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2021

| No. | Dimensi Pengukuran | Tahun | | | | |
|-------|--------------------|-------|------|-------|--------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Kualifikasi | n.a | 9 | 10,34 | 10,82 | 11,907 |
| 2. | Kompetensi | n.a | 7 | 11,48 | 9,15 | 9,343 |
| 3. | Kinerja | n.a | 25 | 25,07 | 25,09 | 25 |
| 4. | Disiplin | n.a | 5 | 4,95 | 4,97 | 4,997 |
| TOTAL | | | 46 | 51,74 | 50,03 | 51,247 |

b. Indeks Merit System

Realisasi Indeks Meryt System tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2

Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|------------------------|-------|------|------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 |
| 1. | Penilaian Sistem Merit | n.a | n.a | n.a | 218 | 113 |
| 2. | Indeks Sistem Merit | n.a | n.a | n.a | 0,52 | 0,259 |

2. Data Pokok Pendukung capaian Indikator Program

a. Persentase Penyusunan Formasi Pegawai

Tabel 2.3

Penyusunan Formasi Pegawai
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Jumlah perangkat daerah yang menyusun formasi dan terverifikasi | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2. | Jumlah perangkat daerah | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 |
| 3. | Persentase Penyusunan formasi Pegawai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- b. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS tepat waktu.

Tabel 2.4
Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun Tepat Waktu Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah usulan Pensiun yang memenuhi syarat | 283 | 304 | 366 | 381 | 424 |
| 2 | SK Pensiun yang terbit sebelum TMT Pensiun | 283 | 304 | 366 | 381 | 424 |
| 3 | Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun tepat waktu (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- c. Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu.

Tabel 2.5
Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah usulan Kenaikan Pangkat yang memenuhi syarat | 860 | 1.034 | 1.020 | 1.053 | 915 |
| 2 | SK Kenaikan pangkat yang terbit sebelum TMT | 860 | 1.032 | 1.020 | 1.053 | 915 |
| 3 | Persentase Penyelesaian Usulan kenaikan pangkat tepat waktu (%) | 100 | 99,81 | 100 | 100 | 100 |

- d. Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional

Tabel 2.6
Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah usulan Pengangkatan dan kenaikan Jabatan Fungsional | n.a | n.a | n.a | n.a | 377 |
| 2 | SK Pengangkatan dan kenaikan Jabatan Fungsional yang terbit | n.a | n.a | n.a | n.a | 377 |
| 3 | Persentase Penyelesaian Usulan Pengangkatan dan kenaikan Jabatan Fungsional (%) | n.a | n.a | n.a | n.a | 100% |

- e. Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan.

Tabel 2.7
Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat Kepemimpinan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah pejabat yang telah lulus diklat PIM | 380 | 253 | 240 | 169 | 157 |
| 2 | Jumlah pejabat | 784 | 710 | 633 | 624 | 626 |
| 3 | Persentase pejabat yang memiliki kompetensi diklat PIM (%) | 48,47 | 35,63 | 37,91 | 27,08 | 25,08 |

- f. Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional

Tabel 2.8
Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional | 446 | 678 | 325 | 462 | 861 |
| 2 | Jumlah PNS | 7.213 | 6.778 | 6.670 | 6.280 | 5.910 |
| 3 | Persentase PNS yang ikut diklat teknis/fungsional | 6,18 | 10,00 | 4,87 | 7,36 | 14,57 |

- g. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas

Tabel 2.9

Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional | 446 | 678 | 325 | 462 | 861 |
| 2 | Jumlah PNS | 7.213 | 6.778 | 6.670 | 6.280 | 5.910 |
| 3 | Persentase PNS yang ikut diklat teknis/fungsional | 6,18 | 10,00 | 4,87 | 7,36 | 14,57 |

- h. Persentase Perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, dan jabatan Pengawas

Tabel 2.10

Persentase Perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Jabatan Terisi | 784 | 710 | 633 | 624 | 626 |
| 2 | Jumlah Jabatan Kosong | 98 | 36 | 184 | 193 | 67 |
| 3 | Jumlah formasi jabatan | 882 | 746 | 817 | 817 | 693 |
| 4 | Persentase Keterisian Jabatan | 88,89 | 95,17 | 77,48 | 76,37 | 90,33 |

- i. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN

Tabel 2.11

Persentase Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin | 7 | 12 | 15 | 16 | 15 |
| 2 | Jumlah PNS | 7.213 | 6.778 | 6.670 | 6.280 | 5.910 |
| 3 | Persentase Pelanggaran Disiplin ASN | 0,09 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,25 |

- j. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN

Tabel 2.12

Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|--|-------|------|------|------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah SK Hukuman Disiplin yang terbit | 4 | 7 | 17 | 15 | 13 |
| 2 | Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin ASN yang masuk | 4 | 7 | 17 | 15 | 15 |
| 3 | Persentase Penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN | 100 | 100 | 100 | 100 | 86,67 |

- k. Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian

Tabel 2.13

Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah data PNS yang terverifikasi | 577 | 1.797 | 5.023 | 5.760 | 6.256 |
| 2 | Jumlah PNS yang mengusulkan updating data | 577 | 1.797 | 5.023 | 5.760 | 6.256 |
| 3 | Persentase Updating data kepegawaian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi lain masih ada indikator yang

belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung dari 13 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Indeks Merit System

Hal ini disebabkan karena verifikasi/penilaian aspek=aspek system merit oleh KASN dilaksanakan pada bulan Nomoer 2021 (dengan dokumen pendukung/pelaksanaan pada aspek-aspek implementasi system merit di tahun 2020) tambahan data untuk menaikkan skor indeks tidak bisa dilakukan karena penambahan data baru dilaksanakan pada akhir triwulan IV tahun 2021 (sudah selesai penilaian/verifikasi oleh KASN)

- Indikator persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan.

Hal ini disebabkan karena pejabat yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sudah purna tugas (pensiun) dan adanya promosi pejabat struktural (Pejabat yang promosi ke jenjang lebih tinggi meskipun yang bersangkutan sudah mengikuti diklapim pada eselon di bawahnya tidak dihitung lagi keikutsertaan diklatpimnya). Hal ini jika dibandingkan dengan anggaran untuk pengiriman diklat kepemimpinan yang setiap tahunnya statis sebanyak kurang lebih 30 orang tidak signifikan untuk mengimbangi jumlah pejabat struktural yang pensiun dan promosi.

- Indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN

Hal ini disebabkan karena terjadinya kasus pada akhir tahun 2021 sehingga pada akhir tahun tersebut masih dilakukan tahapan penyelesaian kasus.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung antara lain :

- Adanya pandemi Covid-19 yang belum berakhir di tahun 2021, mengakibatkan keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan, sehingga target beberapa kegiatan yang direncanakan di tahun 2021 tidak tercapai;
- Penyusunan formasi CASN tahun 2022 (usulan formasi dilakukan tahun 2021) belum diikuti dengan perubahan peta jabatan sehingga berakibat formasi CASN yang disetujui oleh Kemenpan belum sesuai dengan peta jabatan;
- Belum semua PNS terfasilitasi untuk diberikan ID Card khususnya untuk tenaga guru dan fungsional, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk pencetakan *ID Card* bagi PNS dan juga adanya Perubahan Struktur Organisasi Baru (Perda Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020), bertambahnya CPNS/ASN semakin menambah panjang waktu bagi Guru dan Tenaga Fungsional untuk mendapatkan ID Card.
- Keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran pada sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, khususnya untuk pengembangan aplikasi kepegawaian (integrasi data dengan Instansi Pusat/Provinsi)

Terhadap permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Terhadap perubahan capaian target kinerja karena keterbatasan, maka telah dilakukan revisi renja tahun 2021;
- Terhadap formasi CASN yang disetujui oleh Kemenpan belum sesuai dengan peta jabatan, maka telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung untuk melakukan revisi peta jabatan dan dilanjutkan koordinasi dengan Kemenpan untuk usulan peta jabatan sesuai formasi;
- Terhadap fasilitasi pencetakan *ID Card* bagi PNS, maka pencetakan *ID Card* dilakukan dengan anggaran yang tersedia dan *ID Card* diutamakan diberikan kepada Pejabat yang mutasi;

- Terhadap keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran pada sub kegiatan pemeliharaan aplikasi kepegawaian khususnya untuk pengembangan aplikasi kepegawaian, maka telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung akan tetapi belum maksimal karena keterbatasan SDM/Programmer yang ada di Dinas Kominfo, sehingga dimungkinkan untuk melibatkan pihak ke -3 (penyedia jasa) dalam pengembangan aplikasi dengan di koordinir oleh Dinas Kominfo.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD (Pagu indikatif PD) adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD (Pagu indikatif PD) adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat pengurangan pagu indikatif program Penunjang Urusan PD sebesar Rp11.000.000,00
2. Terdapat penambahan pagu indikatif Program Kepegawaian daerah sebesar Rp1.415.000.000;
3. Terdapat pengurangan pagu indikatif Program Pengembangan SDM sebesar Rp119.000.000,00

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

| RANCANGAN AWAL RKPD 2023 | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------------------------|--|--------------------|---|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana | Ketera ngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | BIDANG KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT | | | | | | 1 | BIDANG KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT | | | | | | |
| A. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | A. | Program Kepegawaian Daerah | | | | | | |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | Kab. Temanggung | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | 12 | Paket | 3.600.000 | 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor | Kab. Temanggung | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | 12 | Paket | 5.000.000 | Kebutu han organis asi |
| | - Penyediaan bahan logistik kantor | Kab. Temanggung | Tersedianya pakaian dinas harian bagi PNS | 12 | Paket | 30.000.000 | | - Penyediaan bahan logistik kantor | Kab. Temanggung | Tersedianya pakaian dinas harian bagi PNS | 12 | Paket | 18.600.000 | |
| 2. | Pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemda - Pengadaan Mebel | Kab. Temanggung | Pengadaan Meja staf | 5 | unit | 20.000.000 | 2. | Pengadaan barang milik daerah peunjang Urusan Pemda - Pengadaan Mebel | Kab.Temang gung | Pengadaan Meja staf | 2 | unit | 6.000.000 | Kebutu han organis asi |
| | - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Kab. Temanggung | | 0 | unit | 0 | | - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Kab. Temanggung | Pengadaan scanner HP folio | 1 | unit | 13.000.000 | |
| B. | Program Kepegawaian Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| RANCANGAN AWAL RKPd 2023 | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|-------------------|---------|-------------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian | | | | | |
| | - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Kab. Temanggung | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 0 | dokumen | 0 |
| | - Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian | Kab. Temanggung | Jml dokumen hasil koord. Pelaksanaan administrasi pemberhentian | 0 | dokumen | 0 |
| | - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Temanggung, dlm prov. Jateng | Jml dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 | dokumen | 0 |
| 2 | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | |
| | - Pengelolaan kenaikan pangkat ASN | Kab. Temanggung | Jml Pengelolaan kenaikan pangkat ASN | 0 | dokumen | 0 |
| | - Pengelolaan Promosi ASN | Kab. Temanggung | Jml dokumen hasil pengelolaan promosi | 2 | dokumen | 150.000.000 |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-------------------|---------|-------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana | Ketera ngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | | | | | | | |
| | - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Kab. Temanggung | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 3 | dokumen | 260.000.000 | |
| | - Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian | Kab. Temanggung | Jml dokumen hasil koord. Pelaksanaan administrasi pemberhentian | 4 | dokumen | 10.000.000 | |
| | - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Temanggung, dlm prov. Jateng | Jml dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 | dokumen | 20.000.000 | |
| 1. | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | | |
| 2. | - Pengelolaan kenaikan pangkat ASN | Kab. Temanggung | Jml Pengelolaan kenaikan pangkat ASN | 1.000 | dokumen | 15.000.000 | |
| | - Pengelolaan Promosi ASN | Kab. Temanggung | Jml dokumen hasil pengelolaan promosi | 2 | dokumen | 120.000.000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPd 2023 | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---|-------------------|---------|-------------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | |
| | - Pengelolaan Assessment Center | Kab. Temanggung | Jml dokumen pengelolaan assessment | 0 | dokumen | 0 |
| | - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Kab. Temanggung | Jml ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan | 0 | orang | 0 |
| | - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Kab. Temanggung | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | 0 | orang | 0 |
| 4. | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | |
| | - Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Kab. Temanggung | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 0 | dokumen | 0 |
| | -Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Temanggung | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 0 | laporan | 0 |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---|-------------------|---------|-------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana | Ketera ngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3. | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | | |
| | - Pengelolaan Assesment Center | Kab. Temanggung | Jml dokumen pengelolaan assessment | 2 | dokumen | 1.000.000.000 | |
| | - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Kab. Temanggung | Jml ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan | 10 | orang | 50.000.000 | |
| | - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Kab. Temanggung | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | 300 | orang | 15.000.000 | |
| 4. | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | |
| | - Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Kab. Temanggung | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 2 | dokumen | 22.000.000 | |
| | -Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Temanggung | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 46 | laporan | 7.000.000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2023 | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|-------------------|---------|-------------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - Pembinaan Disiplin ASN | Kab. Temanggung | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 0 | orang | 0 |
| | - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Kab. Temanggung | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 0 | laporan | 0 |
| C | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | |
| 1. | Pengembangan Kompetensi Teknis -Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Kab. Temanggung, dalam Prov.Jateng | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 0 | orang | 0 |
| 2. | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan | Kab. Temanggung, dalam dan luar Prov.Jateng | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi | 110 | laporan | 700.000.000 |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|-------------------|---------|-------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana | Ketera ngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | - Pembinaan Disiplin ASN | Kab. Temanggung | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 140 | orang | 37.000.000 | |
| | - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Kab. Temanggung | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 15 | laporan | 9.000.000 | |
| | Pengembangan Kompetensi Teknis -Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Kab.Temang gung, Dalam Prov.Jateng | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 150 | orang | 170.000.000 | |
| 2. | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan | Kab. Temanggung, dalam dan luar Prov.Jateng | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi | 50 | laporan | 411.000.000 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2023 | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---|-------------------|--------|-------------------|--------------------------|--|--------|---|-------------------|--------|-------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana | Ketera ngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Fungsional - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | Fungsional -Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | |

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung, mengingat BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang tidak secara langsung mengampu kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Tabel 2.13

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume/Besaran | Catatan |
|----|----------------------|--------|----------------------|----------------|---------|
| | NIHIL | | | | |
| | | | | | |

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Temanggung ada 3 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2020-2022

| No. | Nama Inovasi | Input Inovasi | | Proses Inovasi | Output Inovasi | Outcome Inovasi | Pelaksana / Tahun |
|-----|-----------------------------|---------------|------------|--|--|---|---------------------------------|
| | | SDM | Anggaran | | | | |
| 1 | E-File | ASN | -- | ASN mengubah semua file kepegawaian dalam bentuk digital dengan format PDF. File tersebut di upload di E-File melalui akun masing-masing ASN. File tersebut akan di download admin sesuai kebutuhan untuk proses upload pada saat pelayanan kepegawaian di BKN secara online | Tersedianya Soft file kepegawaian ASN | Mempercepat proses layanan kepegawaian yang dilakukan melalui aplikasi BKN yang sudah mulai mengurangi layanan dengan berkas (paperless) seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan / Pensiun | Diskominfo & BKPSDM / 2020 |
| 2 | Pengembangan Mutasi Pegawai | BKPSDM | 48.950.000 | BKPSDM menginput nominasi pegawai yang akan promosi | Tersedianya Aplikasi Penataan Pegawai di | Meningkatnya akurasi penempatan pegawai sesuai | CV. Indotech Solution, Magelang |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-----|----|--|--------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | dan pegawai yang akan mutasi. Tim Penilai Kinerja melakukan penataan pegawai. Selanjutnya Tim Penilai Kinerja memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam bentuk Berita Acara Tim Penilai Kinerja | Lingkungan Pemkab Temanggung | dengan latar belakang pendidikan, syarat jabatan, dan kompetensi yang dimiliki. | Tahun 2020 |
| 3. | Pemutakhiran E-SKP | ASN | -- | ASN memasukkan butir-butir kegiatan sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan jenis jabatan ASN ke aplikasi E-Kinerja pada modul SKP melalui akun masing-masing ASN. SKP yang di masukkan sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) masing-masing ASN. Kinerja pegawai bisa dimasukkan apabila sasaran SKP sudah dimasukkan. | Integrasi SKP dengan kinerja pegawai | Mengintegrasikan butir kegiatan SKP dengan kinerja ASN, sehingga SKP ASN akan sinkron dengan kinerja hariannya dan dapat dinilai secara periodik. | Diskominfo & BKPSDM / 2021 |

2.7. Penghargaan

Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui BKPSDM Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah sebagai Peringkat Terbaik ke-3 dalam Pengelolaan Layanan Informasi Kepegawaian Tahun 2021 dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian di Yogyakarta.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan tujuan Renstra BKPSDM Temanggung Tahun 2019-2023 mengarah kesatu tujuan yaitu Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang berkualitas, untuk pencapaian tujuan tersebut maka BKPSDM menetapkan sasaran: Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian, dengan indikator sasaran 1) Indeks Profesionalitas ASN dan 2) Indeks Merit System

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian dan konsistensi mengimplementasikan pengembangan karir PNS/ASN berdasarkan merit system;
2. Meningkatkan pengembangan SDM Aparatur dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target BKPSDM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Temanggung

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN TARGET | TARGET TAHUN 2023 | TARGET KONDISI AKHIR 2023 |
|--|---|----------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas manajemen Kepegawaian | Indeks Profesionalitas ASN | | | Angka indeks | 50,09 | 50,09 |
| | | Indeks Merit System | | | | 0,61 | 0,61 |
| | | Kepegawaian Daerah | Persentase penyusunan formasi pegawai | | % | 100 | 100 |
| | | | Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu | | % | 100 | 100 |
| | | | Persentase Penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu | | % | 100 | 100 |
| | | | Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional | | % | 100 | 100 |
| | | | Persentase Keterisian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas | | % | 80 | 80 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | | Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas | % | 48 | 48 |
| | | | | Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian | % | 95 | 95 |
| | | | | Persentase pelanggaran Disiplin ASN | % | 0,2 | 0,2 |
| | | | | Persentase Penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN | % | 90 | 90 |
| | | | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan | % | 35 | 35 |
| | | | | Persentase ASN dengan kompetensi teknis dan fungsional sesuai jabatannya | % | 18 | 18 |

Sumber : P Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Kebijakan dan strategi BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD/Pagu Indikatif PD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi adalah Pengurangan dan penambahan pagu indikatif kegiatan dan atau sub kegiatan, tanpa penambahan pagu indikatif secara keseluruhan.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan RKPD/Pagu Indikatif BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2023

| RANCANGAN RENJA BKPSDM TAHUN 2023 | | | RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 | | | (+ / -) |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | Pagu Indikatif |
| A. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN | 5.289.702.584,- | A | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN | 6.574.702.584,- | 1.285.000.000,- |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 4.439.702.584,- | 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 4.428.702.584,- | (-)11.000.000,- |
| a. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.889.495.584,- | a. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.889.495.584,- | 0,- |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.889.495.584,- | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.889.495.584,- | 0,- |
| b. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 118.600.000,- | b. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 108.600.000,- | (-)10.000.000,- |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.600.000,- | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,- | 1.400.000,- |
| | Penyediaan Logistik Kantor | 30.000.000,- | | Penyediaan Logistik Kantor | 20.000.000,- | (-)11.400.000,- |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.000.000,- | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.000.000,- | 0,- |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.000.000,- | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.000.000,- | 0,- |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.000.000,- | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.000.000,- | 0,- |
| c. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 20.000.000,- | c. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 19.000.000,- | (-) 1.000.000,- |
| | Pengadaan mebel | 20.000.000,- | | Pengadaan mebel | 6.000.000,- | (-)14.000.000,- |
| | Pengadaan Mesin dan Peralatan Mesin Lainnya | 0,- | | Pengadaan Mesin dan Peralatan Mesin Lainnya | 13.000.000,- | 13.000.000,- |
| d. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 292.607.000,- | d. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 292.607.000,- | 0,- |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000,- | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000,- | 0,- |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 40.000.000,- | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 40.000.000,- | 0,- |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-----------|--|------------------------|------------------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 247.607.000,- | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 247.607.000,- | 0,- |
| e. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 119.000.000,- | e. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 119.000.000,- | 0,- |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 80.000.000,- | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 80.000.000,- | 0,- |
| | Pemeliharaan Mebel | 2.000.000,- | | Pemeliharaan Mebel | 2.000.000,- | 0,- |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 25.000.000,- | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 25.000.000,- | 0,- |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.000.000,- | | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.000.000,- | 0,- |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya | 2.000.000,- | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya | 2.000.000,- | 0,- |
| 2. | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 150.000.000,- | 2. | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 1.565.000.000,- | 1.415.000.000,- |
| a. | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 0,- | a. | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 290.000.000,- | 290.000.000,- |
| | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 0,- | | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 260.000.000,- | 260.000.000,- |
| | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 0,- | | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0,- | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 20.000.000,- | 20.000.000,- |
| b. | Mutasi dan Promosi ASN | 150.000.000,- | b. | Mutasi dan Promosi ASN | 135.000.000,- | (-)15.000.000,- |
| | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 0,- | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 15.000.000,- | 15.000.000 |
| | Pengelolaan Promosi ASN | 150.000.000,- | | Pengelolaan Promosi ASN | 120.000.000,- | (-)30.000.000 |
| c. | Pengembangan Kompetensi ASN | 0,- | c. | Pengembangan Kompetensi ASN | 1.065.000.000,- | 1.065.000.000,- |
| | Pengelolaan Assessment Center | 0,- | | Pengelolaan Assessment Center | 1.000.000.000,- | 1.000.000.000,- |
| | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 0,- | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 50.000.000,- | 50.000.000,- |
| | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 0,- | | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 15.000.000,- | 15.000.000,- |
| d. | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 0,- | d. | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 75.000.000,- | 75.000.000,- |
| | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 0,- | | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 22.000.000,- | 22.000.000,- |

| | | | | | | |
|----------|---|------------------------|----------|---|------------------------|-------------------------|
| | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 0,- | | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 7.000.000,- | 7.000.000,- |
| | Pembinaan Disiplin ASN | 0,- | | Pembinaan Disiplin ASN | 37.000.000,- | 37.000.000,- |
| | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 0,- | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 9.000.000,- | 9.000.000,- |
| B | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 700.000.000,- | B | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 581.000.000,- | (-)119.000.000,- |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 700.000.000,- | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 581.000.000,- | (-)119.000.000,- |
| 1 | Pengembangan Kompetensi Teknis | 0,- | 1 | Pengembangan Kompetensi Teknis | 170.000.000,- | 170.000.000,- |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 0,- | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 170.000.000,- | 170.000.000,- |
| 2 | Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi managerial dan fungsional | 700.000.000 | 2 | Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi managerial dan fungsional | 411.000.000 | (-)289.000.000,- |
| | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 700.000.000,- | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 411.000.000,- | (-)289.000.000,- |
| | JUMLAH | 5.289.702.584,- | | JUMLAH | 6.574.702.584,- | 1.285.000.000,- |

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa pagu indikatif Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 selaras dengan Surat Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor P/095/050/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Forum Internal PD dan Penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2023, khususnya pada angka 1 (besaran pagu maksimal matrik rancangan renja PD sumber dana DAU/PAD tidak boleh melebihi daftar ketetapan pagu indikatif PD). Namun demikian terdapat beberapa sub kegiatan yang belum teranggarkan/terakomodir pada rancangan Renja BKPSDM tahun 2023 sebagaimana tabel diatas antara lain:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan indikator output : 1) proses pengadaan ASN formasi tahun 2023 sejumlah 80 orang; 2) penerbitan dan penyerahan SK, Pelantikan dan pengambilan sumpah janji PNS formasi tahun 2021 sebanyak 884 orang; 3) pemberkasan dan usul Nomor Induk PPPK formasi tahun 2022 sejumlah 80 orang; 4) penerbitan SK dan Perjanjian kontrak kerja, Pelantikan/pengangkatan PPPK formasi tahun 2022 sebanyak 80 orang;
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center dengan indikator output jumlah dokumen pengelolaan assessment dalam rangka untuk meningkatkan angka indeks Merit System yang masih sangat rendah.

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan dan pencapaian output yang akan dicapai telah diusulkan dan disetujui oleh TAPD untuk masing-masing sub kegiatan antara lain:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN adalah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), terdiri dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00 yang merupakan hasil persetujuan atas usulan desk Renja Tahun 2023 dan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 yang merupakan hasil dari persetujuan atas usulan BKPSDM ke

TAPD dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan CASN Tahun 2023.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain itu juga ada penambahan anggaran pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil tindak lanjut dari LKjIP DPMPTSP berupa kegiatan pengiriman pegawai untuk mengikuti pelatihan. Secara keseluruhan jumlah penambahan anggaran pada RKPD BKPSDM Kabupaten Temanggung adalah sebesar Rp1.285.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung
Tahun 2023

| KODE REKENING | | | | | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2023 | | | | Alokasi Anggaran 2022 | Kinerja Anggaran Tahun 2021 | | | Prakiraan Maju Rencana 2024 | Sumber Dana |
|---------------|----|----|---|----|--|--|--|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | | Alokasi | Realisasi | % | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 03 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 4.428.702.584 | | | | | | DAU |
| 5 | 03 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3.889.495.584 | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Temanggung | 35 | orang/bulan | 3.889.495.584 | 3.376.161.047 | 3.924.311.376 | 3.844.903.086 | 97,98 | 3.889.500.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 108.600.000 | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kec. Temanggung | 12 | paket | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.944.000 | 98,88 | 5.000.000 |
| | | | | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kec. Temanggung | 12 | paket | 18.600.000 | 21.000.000 | 10.069.200 | 10.016.700 | 99,48 | 21.000.000 |
| | | | | | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Temanggung | 12 | paket | 20.000.000 | 15.600.000 | 9.616.400 | 9.616.400 | 100,00 | 15.600.000 |
| | | | | | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Temanggung | 12 | laporan | 15.000.000 | 14.999.990 | 18.476.500 | 16.502.000 | 89,31 | 15.000.000 |
| | | | | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Temanggung | 7 | laporan | 50.000.000 | 39.994.500 | 30.624.500 | 30.361.800 | 99,14 | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|--|--|-----------------|----|---------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|-------------|
| 5 | 03 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 19.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kec. Temanggung | 2 | unit | 6.000.000 | - | | | | | 15.000.000 |
| | | | | | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kec. Temanggung | 1 | unit | 13.000.000 | - | 5.223.800 | 5.076.000 | 97,17 | | 100.000.000 |
| 5 | 03 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 292.607.000 | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Temanggung | 12 | laporan | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.550.000 | 5.356.900 | 96,52 | | 5.000.000 |
| | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kec. Temanggung | 12 | laporan | 40.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 37.023.959 | 77,13 | | 48.000.000 |
| | | | | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kec. Temanggung | 12 | laporan | 247.607.000 | 265.764.750 | 225.485.100 | 216.937.160 | 96,21 | | 265.764.750 |
| 05 | 03 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 119.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kec. Temanggung | 19 | unit | 80.000.000 | 89.998.000 | 90.000.000 | 77.311.400 | 85,90 | | 90.000.000 |
| | | | | | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Kec. Temanggung | 5 | unit | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.975.000 | 99,17 | | 3.000.000 |
| | | | | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Mesin Lainnya | Kec. Temanggung | 10 | unit | 25.000.000 | 24.999.762 | 29.500.000 | 22.905.500 | 77,65 | | 30.000.000 |
| | | | | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kec. Temanggung | 2 | unit | 10.000.000 | - | 20.000.000 | 19.259.000 | 96,30 | | 20.000.000 |

| | | | | | | | Assessment | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|---|--|-----|----------|--------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|
| | | | | | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | Kab.Temang gung | 10 | orang | 50.000.000 | 30.000.000 | 46.500.000 | 45.000.000 | 96,77 | 50.000.000 |
| | | | | | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | Kab.Temang gung, DIY | 300 | orang | 15.000.000 | 10.000.000 | 7.818.500 | 6.273.255 | 80,24 | 15.000.000 |
| 5 | 03 | 02 | 2 | 04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | 75.000.000 | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Temanggung , Prov.Jateng | 2 | dokum en | 22.000.000 | 7.999.900 | 14.578.000 | 14.526.900 | 99,65 | 25.000.000 |
| | | | | | 03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Temanggung ,Prov.Jateng | 46 | laporan | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 8.230.000 | 82,30 | 10.000.000 |
| | | | | | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | Kab. Temanggung | 140 | orang | 37.000.000 | 15.000.000 | 16.371.000 | 16.256.600 | 99,30 | 15.000.000 |
| | | | | | 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Kab. Temanggung , Dalam Prov.Jateng dan DIY, Pusat | 15 | laporan | 9.000.000 | 6.759.900 | 10.508.500 | 10.483.500 | 99,76 | 10.000.000 |
| 5 | 04 | 02 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 581.000.000 | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | 2 | 01 | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | 170.000.000 | | | | | |
| | | | | | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | Prov.Jateng, DIY, Temanggung | 150 | orang | 170.000.000 | - | 95.154.500 | 92.823.150 | 97,55 | 200.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|--|-------------------------------|----|-------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|
| 5 | 04 | 02 | 2 | 02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | 411.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Prov. Jateng, DIY, Temanggung | 50 | laporan | 411.000.000 | 5.044.000.000 | 1.408.591.385 | 1.397.029.963 | 99,18 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | | Jumlah | | | | 6.574.702.584 | 9.372.275.054 | | | | 7.254.864.750 |

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BKPSDM untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja BKPSDM Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di BKPSDM itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan BKPSDM dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun 2023 Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 93,85 % dengan realisasi kegiatan 100%, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan April 2022 sebesar 16,89% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.372.275.054,00

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 BKPSDM Kabupaten Temanggung mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.574.702.584,00 sesuai dengan alokasi ketetapan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Program yang terdiri dari 3 program yaitu: Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi BKPSDM Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2022

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2023

PD : BKPSDM
Sumber Dana : DAU

| Kode Rekening | | | | | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2023 | | | | Total | Alokasi Anggaran 2022 | Kinerja Anggaran Tahun 2021 | | | Prakiraan Maju Rencana 2024 | Sumber Dana |
|---------------|--------------|-------|------|-------------|--|--|--------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------|--------------------------------|----------------|
| Ursn | Bid. Ursn | Prog. | Keg. | Sub Keg. | | | Lokasi | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | | | Alokasi | Realisasi | % | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.428.702.584 | 4.428.702.584 | | | | | | DAU |
| 5 | 03 | 01 | 2 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 3.889.495.584 | 3.889.495.584 | | | | | | |
| | | | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Temanggung | 35 | orang/ bulan | 3.889.495.584 | 3.889.495.584 | 3.376.161.047 | 3.924.311.376 | 3.844.903.086 | 97,98 | 3.889.500.000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2 | 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 108.600.000 | 108.600.000 | | | | | | |
| | | | | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kec. Temanggung | 12 | paket | 5.000.000 | 3.600.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.944.000 | 98,88 | 5.000.000 | |
| | | | | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kec. Temanggung | 12 | paket | 18.600.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 10.069.200 | 10.016.700 | 99,48 | 21.000.000 | |
| | | | | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Temanggung | 12 | paket | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.600.000 | 9.616.400 | 9.616.400 | 100,00 | 15.600.000 | |
| | | | | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Temanggung | 12 | laporan | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.999.990 | 18.476.500 | 16.502.000 | 89,31 | 15.000.000 | |
| | | | | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Temanggung | 7 | laporan | 50.000.000 | 50.000.000 | 39.994.500 | 30.624.500 | 30.361.800 | 99,14 | 50.000.000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2 | 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 19.000.000 | 19.000.000 | | | | | | |
| | | | | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kec. Temanggung | 2 | unit | 6.000.000 | 6.000.000 | - | | | | 15.000.000 | |
| | | | | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kec. Temanggung | 1 | unit | 13.000.000 | 13.000.000 | - | 5.223.800 | 5.076.000 | 97,17 | 100.000.000 | |
| 5 | 03 | 01 | 2 | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 292.607.000 | 292.607.000 | | | | | | |
| | | | | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Temanggung | 12 | laporan | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.550.000 | 5.356.900 | 96,52 | 5.000.000 | |
| | | | | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kec. Temanggung | 12 | laporan | 40.000.000 | 40.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 37.023.959 | 77,13 | 48.000.000 | |
| | | | | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kec. Temanggung | 12 | laporan | 247.607.000 | 247.607.000 | 265.764.750 | 225.485.100 | 216.937.160 | 96,21 | 265.764.750 | |
| 05 | 03 | 01 | 2 | 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 119.000.000 | 119.000.000 | | | | | | |
| | | | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kec. Temanggung | 19 | unit | 80.000.000 | 80.000.000 | 89.998.000 | 90.000.000 | 77.311.400 | 85,90 | 90.000.000 | |
| | | | | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Kec. Temanggung | 5 | unit | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.975.000 | 99,17 | 3.000.000 | |
| | | | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Mesin Lainnya | Kec. Temanggung | 10 | unit | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.999.762 | 29.500.000 | 22.905.500 | 77,65 | 30.000.000 | |
| | | | | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kec. Temanggung | 2 | unit | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 20.000.000 | 19.259.000 | 96,30 | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|---|--|-------|---------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-------|---------------|--|--|
| | | | | | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya | Kec. Temanggung | 5 | unit | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.997.205 | 7.000.000 | 3.487.500 | 49,82 | 7.000.000 | | |
| 5 | 03 | 02 | | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | 1.565.000.000 | 1.565.000.000 | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2 | 01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | 290.000.000 | 290.000.000 | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Kec. Temanggung | 3 | dokumen | 260.000.000 | 260.000.000 | 135.000.000 | 1.818.806.000 | 1.489.586.133 | 81,90 | 150.000.000 | | |
| | | | | | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | BKN Kanreg 1 DIY, Taspen Smg, Tmg Pemberhentian | 12 | dokumen | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 11.609.000 | 10.885.800 | 93,77 | 15.000.000 | | |
| | | | | | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Temanggung, Dalam Prov. Jateng | 4 | dokumen | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.110.000 | 13.557.000 | 74,86 | 20.000.000 | | |
| 5 | 03 | 02 | 2 | 02 | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | 135.000.000 | 135.000.000 | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Kab. Temanggung, Prov. DIY | 1.000 | dokumen | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 23.980.200 | 23.599.200 | 98,41 | 15.000.000 | | |
| | | | | | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Kab. Temanggung, Prov. Jateng, DIY, Pusat | 2 | dokumen | 120.000.000 | 120.000.000 | 150.000.000 | 347.168.000 | 318.044.296 | 91,61 | 150.000.000 | | |
| 5 | 03 | 02 | 2 | 03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | 1.065.000.000 | 1.065.000.000 | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment | Kab. Temanggung | 2 | dokumen | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | - | - | - | 0,00 | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | Kab. Temanggung | 10 | orang | 50.000.000 | 50.000.000 | 30.000.000 | 46.500.000 | 45.000.000 | 96,77 | 50.000.000 | | |
| | | | | | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | Kab. Temanggung, DIY | 300 | orang | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 7.818.500 | 6.273.255 | 80,24 | 15.000.000 | | |
| 5 | 03 | 02 | 2 | 04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Temanggung, Prov. Jateng | 2 | dokumen | 22.000.000 | 22.000.000 | 7.999.900 | 14.578.000 | 14.526.900 | 99,65 | 25.000.000 | | |
| | | | | | 03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Temanggung, Prov. Jateng | 46 | laporan | 7.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 8.230.000 | 82,30 | 10.000.000 | | |
| | | | | | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | Kab. Temanggung | 140 | orang | 37.000.000 | 37.000.000 | 15.000.000 | 16.371.000 | 16.256.600 | 99,30 | 15.000.000 | | |
| | | | | | 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Kab. Temanggung, Dalam Prov. Jateng dan DIY, Pusat | 15 | laporan | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.759.900 | 10.508.500 | 10.483.500 | 99,76 | 10.000.000 | | |
| 5 | 04 | 02 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 581.000.000 | 581.000.000 | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | 2 | 01 | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | 170.000.000 | 170.000.000 | | | | | | | |
| | | | | | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | Prov. Jateng, DIY, Temanggung | 150 | orang | 170.000.000 | 170.000.000 | - | 95.154.500 | 92.823.150 | 97,55 | 200.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|--|-------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--|
| 5 | 04 | 02 | 2 | 02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | 411.000.000 | 411.000.000 | | | | | | | |
| | | | | | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Prov. Jateng, DIY, Temanggung | 50 | laporan | 411.000.000 | 411.000.000 | 5.044.000.000 | 1.408.591.385 | 1.397.029.963 | 99,18 | 1.000.000.000 | |
| | | | | | | | Jumlah | | | 6.574.702.584 | 6.574.702.584 | 9.372.275.054 | | | | | 7.254.864.750 | |

Temanggung, Juni 2022
 KEPALA BKPSDM
 KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660608 199603 2 004